

Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi

Puja Friska Devi Pardede¹, Reno Fernandes²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: pujafriskaaa06@gmail.com, renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan sebuah upaya reformasi dalam bidang pendidikan. Sebab, selama ini pendidikan bagi ABK diselenggarakan secara segregasi (pemisah). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Alasan peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Bukittinggi disebabkan karena daerah Bukittinggi merupakan salah satu daerah yang dicanangkan sebagai kota Inklusif pada tahun 2014, tentunya Bukittinggi mendapat pengetahuan lebih dari daerah lain. Setelah dilakukannya deklarasi pada tahun 2014 tersebut, SMA Negeri 3 Bukittinggi baru menerapkan pendidikan inklusif pada tahun 2019, hal inilah yang ingin diteliti oleh peneliti terkait implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi tersebut. Peneliti menggunakan teori structural fungsional AGIL oleh Robert King Merton untuk menganalisis penelitian ini. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus serta teknik pemilihan informan ialah teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi masih kurang efektif sebab masih terdapat kendala dalam penerapan pendidikan inklusif seperti kurang memadai kurikulum pendidikan berbasis inklusif, tidak adanya guru pendamping khusus (GPK) dalam mendampingi siswa ABK, kurang pembekalan kepada guru terkait pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kata kunci: ABK, Implementasi, Pendidikan inklusif

Abstract

Inclusive education is an effort to reform in the field of education. Because all this time education for ABK is held in segregation. The purpose of this study is to analyze the implementation of inclusive education in SMA 3 Bukittinggi. The reason researchers conducted research in SMA 3 Bukittinggi was because Bukittinggi was one of the areas declared as an Inclusive city in 2014, of course Bukittinggi gained more knowledge than other regions. After the declaration was carried out in 2014, SMA Negeri 3 Bukittinggi only implemented inclusive education in 2019, this is what researchers want to study about the implementation of inclusive education at SMA Negeri 3 Bukittinggi. The researcher used AGIL functional structural theory by Robert King Merton to analyze this research. The method used was a qualitative approach with the type of case study and the informant selection technique was purposive sampling technique. Data collection was carried out by means of observation, interviews, documentation with data analysis techniques from Miles and Huberman. The results of this study explain, that in the implementation of inclusive education in SMA 3 Bukittinggi is still less effective because there are still obstacles in the implementation of inclusive education such as inadequate inclusive-based education curriculum, the absence of special assistant teachers (GPK) in assisting ABK students, lacking provisioning to teachers related to the implementation of inclusive education.

Keywords: ABK, Implementation, Inclusive education



Received: April 18, 2020

Revised: May 7, 2020

Available Online: May 8, 2020

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek penting dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas serta intelektual. Setiap negara akan selalu menawarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya agar mendapatkan pendidikan yang sama (Pramudiana, 2017). Sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945, menyatakan "Setiap warga negara berhak atas pendidikan". Hal ini jelas menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khusus atau yang disebut dengan ABK (Astanu, 2015). Pendidikan inklusif hadir sebagai salah satu bentuk pergeseran dari pendidikan yang awalnya bersifat segregasi untuk anak berkebutuhan khusus ke pendidikan inklusif (Fernandes, 2017).

Istilah inklusif dapat merujuk pada kesetaraan, keadilan, dan hak individu, sebab pendidikan inklusif lebih bersifat pendidikan untuk semua anak (*Education for All*). Di bidang pendidikan, istilah ini dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan orang berdasarkan keterampilan dan / atau gangguan mereka. Pendidikan inklusif merupakan bentuk layanan pendidikan yang mencakup semua anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya di sekolah terdekat dengan daerah tempat tinggal mereka (Slamet & Santosa, 2012). Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan hak-hak individu (Saputra, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memberikan kesan lain pada dunia pendidikan terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan khususnya. Pada pasal 15 tentang pendidikan khusus menyatakan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi siswa penyandang cacat atau siswa dengan kecerdasan luar biasa, yang diadakan secara inklusif atau dalam bentuk unit pendidikan khusus dalam pendidikan dasar dan menengah". Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak lagi hanya terjadi di sekolah-sekolah khusus tetapi terbuka untuk semua unit dan tingkat pendidikan di sekolah luar biasa dan reguler/ umum.

Dengan adanya kebijakan ini, semua calon pendidik di sekolah umum tidak harus dilengkapi dengan keterampilan pendidikan untuk ABK (Saputra, 2016). ABK yang dimaksud disini adalah anak-anak yang mengalami gangguan indra, fisik, bicara dan bahasa, perilaku dan emosional, retardasi mental, ketidakmampuan belajar, autisme, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dan anak berbakat (*gifted*) (Santrock, 2007).

Salah satu daerah yang menerapkan program pendidikan inklusif ialah Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 2014 Kota Bukittinggi dicanangkan sebagai kota inklusif dengan tujuan agar anak-anak disabilitas bisa mengikuti pendidikan disekolah reguler. Dengan dideklarasikannya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi pendidikan inklusif, maka setiap masyarakat memiliki peluang dan hak yang sama untuk belajar di sekolah umum termasuk siswa berkebutuhan khusus atau memiliki disabilitas. Mereka dapat belajar di sekolah umum bersama dengan anak-anak lainnya yang tanpa disabilitas. SMA Negeri 3 Bukittinggi merupakan salah satu sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif pada tahun 2019.

Tabel 1. Data Siswa ABK di SMA Negeri 3 Bukittinggi

Nama	Umur	Kelas	Jenis ABK
Muhammad Reyvan Ikbrar.	16	X	Tunagrahita
Syifa Maharani.	16	X	Tunagrahita
Alif Maulana.	17	X	Anak Berbakat
Rohan Raziq Alfarazi.	16	X	Tunagrahita dan Anak Lamban Belajar.

Sumber: Data SMA Negeri 3 Bukittinggi 2019

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat kekurangan dalam penerapan pendidikan inklusif di SMA 3 ini, ialah *pertama* kurang memadai kurikulum pendidikan berbasis inklusif sehingga penerapan pendidikan inklusif hanya menjadi formalitas, *kedua* tidak adanya guru pendamping khusus (GPK) yang mendampingi ABK agar kehadirannya tidak sia-sia. Padahal kehadiran guru pendamping khusus (GPK) sangat dibutuhkan khususnya oleh guru kelas dan guru mata pelajaran, sehingga nantinya mereka dapat saling berkolaborasi dalam menangani ABK. Dalam Permendiknas no.70 tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusif, ada delapan komponen yang harus mendapatkan perhatian dari sekolah, yaitu: (1) peserta didik, (2) kurikulum, (3) tenaga pendidik, (4) kegiatan pembelajaran, (5) penilaian dan sertifikasi, (6) manajemen sekolah, (7) penghargaan dan saksi, (8) pemberdayaan masyarakat (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009). Tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik profesional dalam melaksanakan pendidikan inklusif termasuk GPK tersebut. *Ketiga*, kurangnya pembekalan kepada guru yang dilakukan pihak sekolah terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga masih banyak guru yang tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam lingkungan kelas reguler.

Dengan berbagai kekurangan yang dihadapi SMA Negeri 3 Bukittinggi dalam menerapkan kebijakan pendidikan inklusif, faktanya sekolah telah menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tergolong kepada anak retardasi mental. Retardasi mental ialah sebuah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (nilai IQ dibawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Tipe retardasi mental ini terbagi menjadi 4 ialah ringan (rentang IQ 55-70), moderat (rentang IQ 40-54), berat (rentang IQ 25-39), parah (rentang IQ <25) (Santrock, 2007).

Adapun penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Endis Firdaus berjudul "*Pendidikan inklusif dan implementasinya di Indonesia*", hasil penelitiannya mengatakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus atau cacat yang bersekolah, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga target untuk mewujudkan program pendidikan untuk semua pada tahun 2015 tampaknya menjadi lebih realistis. Walaupun implementasinya di Indonesia masih belum tampak kesungguhan upaya yang signifikan baik oleh negara maupun masyarakat dan lembaga pendidikan terkait (Firdaus, 2010).

Penelitian kedua yang juga menunjukkan hal yang demikian seperti yang dilakukan oleh Nofita Sari Astanu berjudul "*Implementasi program pendidikan inklusif*", hasil penelitiannya mengatakan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan inklusif belum berjalan dengan maksimal, masih terlihat kurangnya peran masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan ada yang terlihat acuh tak acuh terhadap perkembangan anaknya disekolah (Astanu, 2015).

Selain itu, penelitian lain yang juga menunjukkan penyelenggaran pendidikan inklusif berjalan kurang maksimal ialah penelitian yang dilakukan oleh Anggun Dyah Anjasari dengan judul "*Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang SD, SMP, SMA di Kabupaten Sidoarjo*", hasil penelitiannya mengatakan bahwa dalam konsep sekolah inklusi yang ideal hendaknya waktu untuk peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak di ruangan kelas reguler daripada di ruangan sumber. Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi biasanya menempatkan peserta didik dengan autisme dan tunagrahita lebih banyak di ruangan sumber, baik secara kelompok maupun individu. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan low vision, dan tunadaksa waktunya lebih banyak di ruangan kelas reguler secara individu (Anjasari, Efendy, & Sulthoni, 2018).

Jika penelitian sebelumnya membahas tentang proses penyelenggaraan pendidikan inklusif serta kebijakan-kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia maka adapun perbedaan antara studi relevan dengan penelitian ini ialah lebih memfokuskan tentang bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi yang baru dilaksanakan pada tahun 2019 ini, serta sumber daya yang dimiliki sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 tersebut. Sebab berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, penerapan pendidikan inklusif di sekolah ini terjadi tanpa ada kesiapan terhadap pihak sekolah di SMA 3 Bukittinggi. Dari permasalahan inilah yang menjadi dasar ketertarikan bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMA Negeri 3 Bukittinggi"

Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk melihat serta mengungkapkan suatu keadaan maupun objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif (Yusuf, 2017). Tipe penelitian yang digunakan ialah studi kasus, merupakan rancangan penelitian yang mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus. Penelitian dengan tipe studi kasus, menggunakan berbagai metode dan berbagai sumber data. Ini berarti bahwa dalam penelitian studi kasus, pendekatan metodologis (alat pengumpulan data) bersifat eklektik (penggunaan alat pengumpulan data yang membantu tujuan penelitian) (Gumilang, 2016).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive*, yaitu subyek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Untuk mendapatkan data terkait, maka informannya yakni: Guru, Kepala Sekolah, Orang Tua ABK

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis pada penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

Agar data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini akurat, valid dan sah, maka dilakukan dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai " sebuah sistem layanan pendidikan yang mencakup seluruh anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar dengan teman sebaya di sekolah biasa yang terdekat dengan tempat tinggal mereka." Implementasi pendidikan inklusif mensyaratkan bahwa sekolah dalam membuat penyesuaian kurikulum, lembaga dan infrastruktur pendidikan serta sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa (Direktorat PLB 2004). Selain itu, Pasal 1 Menteri Ordonansi Pendidikan Nasional RI - No. 70 tahun 2009 tentang topik "Pendidikan inklusif bagi siswa penyandang cacat dan potensi intelijen dan / atau bakat khusus": yang dimaksud dengan pendidikan inklusif ialah sebuah sistem pendidikan, yang menawarkan peluang bagi semua anak penyandang cacat dan kemampuan intelijen serta bakat khusus yang secara umum menghadiri magang atau belajar di lingkungan pendidikan bersama dengan siswa" (Handayani,

Angga, & Rahadian, 2013). Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Peneliti melakukan kegiatan observasi untuk melihat implementasi pendidikan inklusif di SMA tersebut pada semester Juli-Desember 2019. Selama observasi satu semester itu peneliti menemukan masalah bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak sesuai dengan harapan. Dalam penerapan pendidikan inklusif masih terdapat banyak kekurangan yang ditemui ialah *pertama*, kurang memadai kurikulum pendidikan berbasis inklusif sehingga penerapan pendidikan inklusif hanya menjadi formalitas. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan ibu Yuliesa Anggia Maharani, S.Sos selaku guru sosiologi di SMA Negeri 3 Bukittinggi ialah, bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat kendala ialah teknik dalam menyamaratakan pengajaran bagi ABK dan siswa normal masih sangat sulit apalagi dalam mengambil standar penilaian KKM bagi anak ABK, sebab selama ini KKM bagi ABK masih mengikuti KKM bagi anak reguler, serta media pembelajaran dan bahan ajar masih sangat sulit ditentukan oleh guru mata pelajaran, kemudian guru masih belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam kelas reguler sehingga tidak jarang waktu guru dalam proses mengajar habis akibat focus dalam memperhatikan sifat ABK.

Kedua ialah tidak adanya guru pendamping khusus (GPK) yang mendampingi ABK agar kehadirannya tidak sia-sia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bukittinggi ibu Efayanti, M.Pd. berdasarkan kesimpulan wawancara yang diperoleh peneliti ialah SMA Negeri 3 Bukittinggi masih sangat membutuhkan GPK dalam menolong guru mata pelajaran dalam proses belajar mengajar agar kehadiran ABK di kelas tidak sia-sia, sehingga penerapannya saat ini masih kurang efektif, namun dibalik itu respon orangtua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif baik.

Ketiga ialah kurangnya pembekalan kepada guru yang dilakukan pihak sekolah terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga masih banyak guru yang tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam kelas reguler. Sehingga tidak jarang guru bimbingan konseling (BK) turun tangan membantu guru dalam menangani sikap siswa ABK.

Setelah mendapatkan data diatas maka peneliti dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi menggunakan teori Strukturan Fungsional oleh Talcott Parsons dengan asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sebuah sistem sosial ialah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka yang terjadi ialah struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Wirawan, 2012) Dengan adanya asumsi dasar ini, Parsons percaya bahwa terdapat empat imperative fungsional yang diperlukan dalam sistem adaptasi AGIL atau pemeliharaan pola.

Adaptation (adaptasi)

Adaptasi adalah fungsi adaptasi, yang berarti sistem sosial jika Anda inginkan bertahan, maka harus ada struktur atau institusi yang mampu melakukan fungsi penyesuaian di sekitarnya (Maunah, 2016). Dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif, memaksa SMA Negeri 3 Bukittinggi untuk tetap menerapkan pendidikan inklusif meskipun sekolah memiliki keterbatasan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Minimnya ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) yang disediakan oleh dinas pendidikan kota Bukittinggi kepada sekolah serta minimnya pendanaan yang diberikan oleh dinas pendidikan kota Bukittinggi membuat sekolah sulit dalam melengkapi sarana-prasarana penunjang jalannya pendidikan inklusif.

Adaptation (adaptasi) yang dilakukan oleh guru mata pelajaran di SMA Negeri 3 Bukittinggi dalam proses belajar dan mengajar dengan semampunya, tidak jarang tujuan dari pembelajaran tidak tercapai dikarenakan waktu guru banyak tersita oleh perilaku ABK. Hal ini

disebabkan guru kelas dan guru mata pelajaran tidak mengerti bagaimana cara mengajar dan menangani sikap anak berkebutuhan khusus. Penyebab dari ketidakpahaman guru dalam menangani dan mengajar anak berkebutuhan khusus adalah minimnya pelatihan yang diberikan baik dari pihak sekolah dan dinas pendidikan kepada guru tentang model pembelajaran inklusi yang tepat.

Padahal kehadiran guru pendamping khusus sangat dibutuhkan terutama oleh guru mata pelajaran, sehingga nantinya mereka dapat berkolaborasi dalam menangani ABK.

Goal Attainment (pencapaian tujuan)

Sebuah sistem harus bisa mencapai dan mendefinisikan tujuan utamanya. (Ritzer, 2014). Adanya keterbatasan pemahaman guru kelas tentang anak berkebutuhan khusus (ABK), serta keterbatasan jumlah guru pendamping khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif disekolah membawa dampak sempit tentang tujuan pendidikan inklusif yang sebenarnya. Agar tujuan dari penerapan pendidikan inklusif tercapai, kepala sekolah tetap membangun komitmen dengan guru untuk tetap menjalankan pendidikan inklusif meskipun dengan segala macam keterbatasan sumber daya pendukung, Sekolah juga membangun komitmen dengan orang tua anak berkebutuhan khusus. Bahwa sekolah dan pihak orangtua harus menjalin komunikasi yang baik agar orang tua dari ABK dapat mengetahui perkembangan sang anak selama menjalani pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Agar sistem tetap mencapai kestabilan, maka setiap pihak perlu menjaga komitmen demi tercapainya tujuan tersebut.

Integration (Integrasi)

System harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperative fungsional (A, G, L). Integrasi juga merupakan prasyarat yang berhubungan dengan interelasi antar para anggota dalam system sosial. (Wirawan, 2012)

Guru, orangtua serta ABK harus bekerjasama dalam menerapkan pendidikan inklusif ini serta mengatur hubungan antar sesama komponen dengan menerapkan pola komunikasi antara guru dengan orangtua ABK. Penerapan pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik melalui jalinan kerjasama dan komunikasi secara terbuka dengan keluarga anak untuk mengetahui perkembangan sang anak serta dalam memenuhi kebutuhan anak.

Disisi lain tidak jarang guru BK di SMA Negeri 3 Bukittinggi melakukan diskusi secara pribadi dengan siswa ABK untuk mengetahui perubahan yang dirasakan secara tidak langsung oleh anak berkebutuhan khusus tersebut baik dari segi sosialisasi, pembelajaran serta perubahan sikap anak.

Latency (pemeliharaan pola)

Sistem disini harus saling melengkapi, memelihara serta memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Pemeliharaan pola dilakukan oleh pihak sekolah agar penyelenggaraan dan tujuan pendidikan inklusif tetap terlaksana adalah dengan melakukan berbagai macam strategi pelaksanaan ditengah keterbatasan sumber daya diantaranya: *pertama*, SMA Negeri 3 Bukittinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana pendidikan inklusif tetap menerima siswa yang berkebutuhan khusus. *Kedua*, guru dituntut harus mampu menangani, sikap siswa ABK, serta dalam mengajar dan mendidik anak berkebutuhan khusus. *Ketiga*, sekolah akan terus membekali pada guru dalam berkomunikasi terhadap anak inklusi dan guru dalam waktu yang sama di sebuah kelas serta memberikan pemahaman mengenai model dan metode pembelajaran yang tepat untuk ABK.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di SMA Negeri 3 Bukittinggi tentang penerapan pendidikan inklusif, kesimpulannya bahwa dalam penerapan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bukittinggi masih belum berjalan secara efektif. Dikarenakan dalam penerapannya masih memiliki beberapa hambatan seperti *pertama*, kurang memadai kurikulum pendidikan berbasis inklusif. *Kedua*, tidak adanya guru pendamping khusus (GPK) yang mendampingi ABK agar kehadirannya tidak sia-sia. *Ketiga*, kurangnya pembekalan kepada guru terkait pelaksanaan pendidikan inklusif.

Daftar Pustaka

- Anjasari, D. A., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA, di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91–104.
- Astanu, S. N. (2015). Implementasi Program Pendidikan Inklusif (Studi Evaluatif Metode CIPP di SMA Negeri 2 Metro). *Disertasi*. Universitas Negeri Lampung
- Fernandes, R. (2017). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119–125. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Firdaus, E. (2010). Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia. *Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, 24 Januari 2010*.
- Gumilang, S. G. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Fokus Koneseling*, 2(2), 144–159.
- Handayani, T., Angga, D., & Rahadian, S. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 27–48.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Cendekia: Journal of Education and Teaching*, 10(2), 159–178. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i2.136>
- Pramudiana, D. I. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK di Surabaya. *Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Edisi 7*. Jakarta: Kencana.
- Santrock, W. J. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–14.
- Slamet, H., & Santosa, J. (2012). Revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Pasca Implementasi Program Pendidikan Inklusi. *Penelitian Humaniora*, 13(1), 74–85.
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.